LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - April 2025

JUDUL

"ASPEK PEMELIHARAAN ASET PADA RENCANA PENANGANAN PANTAI NUSA PENIDA DAN NUSA LEMBONGAN."

Fokus Strategis

Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-1. Dalam membangun daerah Pemerintah daerah Kabupaten sangat membutuhkan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Propinsi, baik berupa bagi hasil, DAU, DAK maupun APBN langsung sesuai urusan pemerintahan.

2. Balai Wilayah Sungai Bali – Penida, Direktoran Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, melaui dana APBN menyusun Rencana Penanganan Pantai Nusa Penida dan Nusa Lembongan tahun anggaran 2025.

3. Pemeliharaan pantai yang baik dan terintegrasi dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan baik pemerintah Pusat dan Daerah maupun pihak swasta yang merasakan manfaat dan keberadaan pantai.

4. Dalam manajemen pengelolaan pantai yang meliputi :

a. Pengelolaan Pemerintah Pusat antara lain : (i) Manajememen pemeliharaan daerah isian pasir, dan (ii) Manajemen pemeliharaan bangunan pelindung pantai (reventment, groin, breakwater)

b. Pengelolaan Pemerintah Daerah antara lain : (i) Manajemen Pemeliharaan fasilitas Publik (walkway, gazebo, lampu penerangan, dsb); (ii) Manajemen pemeliharaan kebersihan ruas pantai (sistem persampahan) dan (iii) Manajemen pengelolaan pemanfaatan ruas pantai.

5. Dalam pemeliharaan aset bangunan belum diuraikan status pengelolaan asetnya

I. Maksud dan Tujuan

Maksud pembahasan ini adalah agar tertib administrasi sejak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah jelas status kepemilikan aset yang akan dibangun dan bertujuan agar rencana instansi pengelola asetnya dan instansi yang memelihara bangunan pantai nantinya menjadi jelas. Sehingga Pemerintah daerah bisa merencanakan anggaran pemeliharaan pada pos penganggaran pemeliharaan yang tepat.

II. Ide dan Gagasan

1. Dalam Perencanaan pembangunan pengaman pantai di Nusa Penida dan Nusa Lembongan sudah ditetapkan pihak yang akan mengelola dan memelihara aset bangunan yang dibangun.

2. Pembangunan pengaman pantai yang menggunakan anggaran APBN, tentu asetnya akan dicatat di Pemerintah Pusat, sehingga Aset yang akan dipeliharan Pemerintah Daerah harus dibuatkan dokumen kerjasama pengelolaan dan serah terima pengelolaan, agar pemerintah Daerah dapat merencanakan dan menganggarkan pada pos penganggaran yang tepat.

III. Rekomendasi

1. Dinas PUPR Kabupaten Klungkung mengkoordinasikan kerjasama pengelolaan aset yang akan dibangun, apakah akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten atau hanya diserah kelolakan.

2. Bappeda mengkoordinasikan tahun anggaran berapa akan dibangun pengaman pantai dimaksud, sehingga Pemerintah Daerah dapat merencanakan pemeliharaan pada pos penganggaran yang tepat.

Semarapura, 28 Mei 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

